

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Pada bab ini menyajikan tinjauan pustaka yang mendukung kerangka pemikiran dan hipotesis. Tinjauan Pustaka didasarkan pada penelitian sebelumnya dan memberikan gambaran tentang konsep dasar dari variabel yang diteliti. Selain itu, pada bab ini juga penulis membahas mengenai kerangka pemikiran yang berhubungan dengan hubungan variabel bebas dan terikat. Kemudian diikuti oleh hipotesis yang akan diajukan.

2.1.1 Kemiskinan

2.1.1.1 Pengertian Kemiskinan

Menurut (Badan Pusat Statistik, 2023) kemiskinan memiliki arti suatu kondisi ketidakmampuan seseorang dari sisi ekonomi, materi dan fisik untuk mencukupi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dengan pengeluaran. Kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketika seseorang tidak mampu mencukupi pendapatan agar kebutuhan pokok terpenuhi sehingga masyarakat kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup. Dikatakan penduduk miskin jika seseorang memiliki pendapatan atau aksesnya terhadap barang dan jasa relatif rendah dibandingkan rata-rata orang lain. Kemampuan pendapatan ini untuk mencukupi kebutuhan pokok masyarakat berdasarkan standar harga tertentu adalah rendah sehingga mencukupi kebutuhan pokok standar kualitas hidup pada umumnya (Jacobus et al., 2019).

Kemiskinan merupakan awal dan akhir dari proses kemelaratan sosial yang menyatukan faktor kelemahan fisik, kerentanan dan impotensi isolasi. Selain itu, (Sayifullah & Gandasari, 2016) kemiskinan akan menjebak orang untuk membuatnya sulit keluar dari sindrom ini. Memahami masalah untuk memerangi kemiskinan seringkali membutuhkan upaya untuk mendefinisikan, mengukur, dan mengidentifikasi penyebab dari kemiskinan tersebut.

2.1.1.2 Teori Kemiskinan

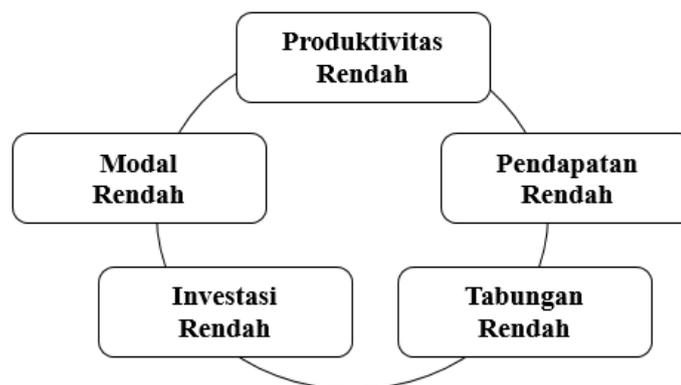
Menurut Ragnar Nurkse (1953) Teori Lingkaran Setan Kemiskinan (*Vicious Cycle of Poverty*) dalam (Nasution et al., 2021) mengemukakan bahwa kemiskinan yang tidak mempunyai ujung dan pangkalnya yang mana semua unsur yang menyebabkan kemiskinan akan saling berhubungan. Lingkaran Setan Kemiskinan oleh Ragnar Nurkse (1953) bahwa kemiskinan (ketidaksejahteraan) dan ketidaksempurnaan pasar menyebabkan rendahnya produktivitas. Produktivitas yang rendah menyebabkan pendapatan masyarakat menurun.

Teori ini merupakan konsep yang mengendalikan suatu hubungan melingkar dari sumber-sumber daya yang cenderung saling berpengaruh satu sama lain sehingga menempatkan suatu negara miskin terus-menerus dalam suasana kemiskinan. Dengan kata lain lingkaran setan ini merupakan ibarat sebuah lingkaran yang tidak memiliki pangkal ujung, sehingga akan terus berputar pada lingkaran yang sama. Teori ini mencoba menjelaskan penyebab kemiskinan dari sisi ekonomi yaitu:

1. Secara makro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan kepemilikan sumber daya yang menimbulkan ketimpangan distribusi

pendapatan, di mana penduduk miskin hanya memiliki sumber daya yang terbatas dan kualitasnya yang rendah.

2. Kemiskinan timbul karena terdapatnya perbedaan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah mengakibatkan produksinya rendah, yang pada akhirnya upah pun menjadi rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini diakibatkan karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena faktor keturunan.
3. Kemiskinan muncul karena perbedaan akses modal.



Sumber: Ragnar Nurkse (1953) dalam (Gilarso, 2004)

Gambar 2.1 Lingkaran Setan Kemiskinan

Penyebab kemiskinan menurut Ragnar Nurkse yaitu adanya keterbelakangan dan kurangnya modal menjadi penyebab produktivitas rendah sehingga pendapatan yang diterima juga rendah. Rendahnya pendapatan berdampak pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya tabungan dan investasi ini menyebabkan keterbelakangan.

2.1.1.3 Karakteristik Kemiskinan

Dalam (Dalimoenthe, 2022) terdapat lima karakteristik penduduk miskin, sebagai berikut:

1. Tidak memiliki faktor produksi sendiri.
2. Tidak bisa memperoleh aset produksi sendiri.
3. Tingkat Pendidikan yang rendah.
4. Banyak diantara mereka tidak mempunyai fasilitas.
5. Banyak dari mereka yang berusia muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang memadai.

2.1.1.4 Jenis-jenis Kemiskinan

Kemiskinan dapat dibagi dalam empat jenis (Chriswardani Suryawati, 2005), sebagai berikut:

1. Kemiskinan Absolut

Jika pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya seperti pangan, sandang, Kesehatan, perumahan, dan pendidikan untuk bisa hidup dan bekerja.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum terjangkau ke seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.

3. Kemiskinan Kultural

Sikap seseorang yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari

pihak luar. Sikap seseorang atau masyarakat disebabkan oleh faktor budaya.

4. Kemiskinan Struktural

Kondisi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan naiknya kemiskinan.

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

2.1.2.1 Pengertian Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran adalah orang-orang yang tergolong angkatan kerja dan yang secara aktif mencari pekerjaan dengan tingkat gaji tertentu tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Pengangguran (Salsabila Sevira Putri, 2023) menjadi salah satu masalah dalam ekonomi makro yang terjadi secara langsung dan berpengaruh terhadap keberlangsungan manusia. Sebagian orang berpikir jika kehilangan pekerjaan akan mengalami kemunduran dalam standar kehidupan.

Menurut (Badan Pusat Statistik, 2023b) tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja yaitu penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka sering digunakan untuk mengukur tingkat pengangguran di suatu wilayah serta persentase dari total angkatan kerja yang menganggur.

Untuk dapat mengetahui tingkat pengangguran terbuka maka rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\text{TPT} = \frac{\text{Jumlah pengangguran}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$$

Apabila Nilai TPT tinggi maka dapat terindikasi bahwa di wilayah tersebut terdapat banyak masyarakat yang menganggur atau tidak bekerja padahal termasuk dalam angkatan kerja. Hal tersebut berkemungkinan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kemiskinan.

2.1.2.2 Teori Pengangguran

Adapun teori pengangguran dari salah satu ahli terkenal adalah Malthus. Dalam buku Ekonomi Sumber Daya (Mulyadi, 2014) Malthus menyatakan bahwa manusia berkembang jauh lebih cepat dibandingkan produksi hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan manusia. Karena perkembangan jumlah manusia jauh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi hasil-hasil pertanian, maka Malthus meramal bahwa suatu ketika akan terjadi malapetaka yang akan menimpa umat manusia. Maka teori Malthus ini menyatakan menyatakan penduduk cenderung bertumbuh secara tak terbatas hingga mencapai batas persediaan makanan, hal ini menyebabkan manusia saling bersaing dalam kelangsungan hidupnya, dengan persaingan maka akan ada manusia yang tersisih. Pada masyarakat modern diartikan bahwa semakin pesatnya jumlah penduduk akan menghasilkan tenaga kerja yang semakin banyak, namun hal ini tidak diimbangi dengan kesempatan kerja yang ada. Karena jumlah kesempatan yang sedikit itulah

maka manusia saling bersaing dalam memperoleh pekerjaan dan yang tersisih dalam persaingan tersebut menjadi golongan penganggur.

2.1.2.3 Jenis-jenis Pengangguran

Konsep pengangguran dapat dilihat dari tiga dimensi, yaitu: waktu, identitas pekerjaan dan produktivitas. Berikut ini beberapa jenis pengangguran menurut Sukirno (2006) dalam (Ayuningsas, 2023), yaitu:

1. Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya

- a. Pengangguran Normal atau Friksional

Pengangguran normal atau friksional adalah pengangguran yang terjadi karena keinginan seseorang dalam mencari pekerjaan lain yang lebih baik. Sehingga mendorong para pekerja meninggalkan pekerjaan yang lama dan mencari pekerjaan baru yang sesuai dengan keahliannya atau gaji yang lebih tinggi. Seseorang yang dalam mencari pekerjaan yang baru untuk sementara para pekerja ini termasuk dalam golongan sebagai penganggur.

- b. Pengangguran Siklikal

Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang disebabkan oleh menurunnya permintaan agregat. Kemerosotan permintaan agregat ini akan mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi pekerja atau menutup perusahaan, dan akan mengakibatkan pengangguran bertambah.

- c. Pengangguran Struktural

Pengangguran struktural merupakan pengangguran yang disebabkan oleh perubahan pada struktur kegiatan ekonomi yang mengakibatkan

kemerosotan pada industri dan perusahaan. Kemerosotan ini akan membuat perusahaan menutup produksinya dan membuat tenaga kerja menganggur.

d. Pengangguran Teknologi

Pengangguran teknologi merupakan pengangguran yang terjadi akibat adanya pergantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia.

3 Jenis Pengangguran Berdasarkan Cirinya

a. Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka disebabkan lebih rendahnya lowongan pekerjaan dari penambahan tenaga kerja. Akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat mendapatkan pekerjaan.

b. Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran tersembunyi merupakan pengangguran terjadi ketika didapati bahwa jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan supaya ia dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien.

c. Pengangguran Bermusim

Pengangguran bermusim ini terjadi pada setiap pergantian musim. Terutama pada sektor pertanian dan perikanan. Misalnya, jika musim hujan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur.

d. Setengah Menganggur

Setengah menganggur adalah menganggur terjadi akibat seseorang migrasi dari desa ke kota. Akan tetapi tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sehingga terpaksa menjadi penganggur sepenuh waktu. Ada juga yang tidak menganggur, tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu, dan jam kerja yang jauh lebih rendah dari pekerja normal.

2.1.2.4 Penyebab Terjadinya Pengangguran

Dalam (Ishak, 2018) faktor penyebab pengangguran sebagai berikut:

1. Sedikitnya lapangan pekerjaan yang menampung para pencari kerja. Banyaknya para pencari kerja tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang dimiliki oleh Negara Indonesia.
2. Kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para pencari kerja. Banyak jumlah sumber daya manusia yang tidak memiliki keterampilan menjadi salah satu penyebab makin bertambahnya angka pengangguran di Indonesia.
3. Kurangnya informasi, pencari kerja tidak memiliki akses untuk mencari informasi tentang perusahaan yang memiliki kekurangan tenaga kerja.
4. Kurang meratanya lapangan pekerjaan, banyaknya lapangan pekerjaan di kota, dan sedikitnya perataan lapangan pekerjaan.
5. Masih belum maksimalnya upaya pemerintah dalam memberikan pelatihan untuk meningkatkan softskill, sifat malas yang masih menjangkit para pencari kerja yang membuat para pencari kerja mudah menyerah dalam mencari peluang kerja.

2.1.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

2.1.3.1 Pengertian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Pendekatannya sendiri mencakup angkatan kerja yang secara aktif bekerja atau sedang mencari pekerjaan yang mana di dalam kedua aktivitas tersebut ada dalam jangka waktu tertentu. Dengan begitu menurut (Alisman, 2016) dalam pendekatan ini bias membedakan antara angkatan kerja yang menjadi dua kelompok bekerja dan sedang mencari pekerjaan.

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran (Mu'min, 2023). Semakin besar tingkat partisipasi angkatan kerja akan menyebabkan semakin besar jumlah angkatan kerja. Begitu pula sebaliknya, semakin besar jumlah penduduk yang masih sekolah dan yang mengurus rumah tangga akan menyebabkan semakin besar jumlah yang tergolong bukan angkatan kerja dan akibatnya semakin kecil tingkat partisipasi angkatan kerja (Nurfiani Syamsuddin, Zahrul Fuadi, 2021). Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sendiri merupakan suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei.

Indikator untuk menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{TPAK} = \frac{\text{Angkatan Kerja}}{\text{Penduduk 15 tahun ke atas}} \times 100\%$$

Dari rumus diatas, maka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dapat dihitung baik bagi seluruh angkatan kerja atau untuk bagian-bagiannya, seperti untuk golongan kelamin dan golongan umur tertentu. Jumlah penduduk berusia kerja dalam satu kurun waktu dapat tetap. Sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja, dalam kurun waktu yang sama bisa berubah-ubah. Oleh karenanya besarnya jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tersebut dapat berubah-ubah.

2.1.3.2 Teori Ketenagakerjaan

Berikut teori mengenai ketenagakerjaan menurut para ahli, sebagai berikut:

1. Teori Keynes

Jhon Maynard Keynes (1883-1945), berpendapat bahwa dalam kenyataan pasar tenaga kerja tidak bekerja sesuai dengan pandangan klasik. Dimanapun para pekerja mempunyai semacam serikat kerja yang akan berusaha memperjuangkan kepentingan buruh dari penurunan tingkat upah. Kalaupun tingkat upah diturunkan tetapi kemungkinan ini dinilai Keynes kecil sekali, tingkat pendapatan masyarakat tentu akan menurun. Turunya pendapatan sebagian masyarakat akan menyebabkan turunya daya beli masyarakat, yang akan menyebabkan konsumsi secara keseluruhan berkurang. Berkurangnya daya beli masyarakat akan mendorong turunya harga-harga.

2. Teori Klasik Adam Smith

Adam Smith (1729-1790), merupakan tokoh utama dari aliran ekonomi yang kemudian dikenal sebagai aliran klasik. Dalam hal ini teori klasik Adam Smith juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh. Dengan kata lain, alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat perlu bagi pertumbuhan ekonomi.

2.1.3.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Faktor-faktor yang mempengaruhi besar TPAK menurut Simanjuntak (2001:45) dalam (Moh. Taufiq Fudloli, 2015) adalah sebagai berikut:

1. Penduduk yang masih sekolah dan mengurus rumah tangga

Semakin besar penduduk yang bersekolah dan mengurus rumah tangga, maka semakin kecil jumlah angkatan kerja, sehingga semakin kecil pula TPAKnya.

2. Jenis kelamin

TPAK antara laki-laki dan perempuan berbeda, biasanya TPAK perempuan lebih rendah dibandingkan dengan TPAK laki-laki, hal ini erat kaitannya dengan sistem nilai masyarakat, bahwa laki-laki memikul kewajiban utama untuk mencari nafkah.

3. Tingkat umur

Penduduk yang berumur muda umumnya tidak mempunyai tanggung jawab sebagai pencari nafkah untuk keluarga, karena mereka pada umumnya bersekolah.

4. Tingkat upah

Semakin tinggi tingkat upah dalam masyarakat, semakin banyak anggota keluarga yang tertarik masuk pasar kerja, maka semakin banyak jumlah angkatan kerja yang mengakibatkan semakin tinggi juga TPAKnya.

5. Tingkat pendidikan

Semakin banyak penduduk yang bersekolah maka jumlah angkatan kerja semakin kecil sehingga TPAKnya rendah. Selain itu, semakin tinggi tingkat pendidikan semakin banyak peluang yang disediakan untuk bekerja dan nilai waktunya semakin mahal.

2.1.4 Ketimpangan Distribusi Pendapatan

2.1.4.1 Pengertian Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Ketimpangan pendapatan menunjukkan perbedaan pendapatan yang dihasilkan dalam masyarakat. Maka ketimpangan pendapatan merupakan perbedaan jumlah pendapatan yang diterima masyarakat sehingga mengakibatkan perbedaan pendapatan yang lebih besar antar golongan dalam masyarakat tersebut (Neng Mutiara Salsabila, 2023). Akibatnya yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin.

Menurut (Kuncoro, 2006) menyatakan bahwa ketimpangan mengacu pada standar hidup yang relatif pada seluruh masyarakat, karena kesenjangan antar

wilayah yaitu adanya perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia. Perbedaan ini yang menyebabkan tingkat pembangunan dan distribusi pendapatan di setiap wilayah berbeda-beda, sehingga menimbulkan adanya gap atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut. (Todaro, Micheal P., 2006) dalam mengukur distribusi pendapatan diukur dari dua ukuran pokok yaitu distribusi pendapatan pribadi atau distribusi pendapatan personal dan distribusi fungsional secara terpisah-pisah, yang menggambarkan penerimaan pendapatan penduduk yaitu 40% penduduk menerima pendapatan paling rendah, 40% penduduk menerima pendapatan menengah dan 20% menerima pendapatan yang paling tinggi.

2.1.4.2 Teori dan Pengukuran Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Beberapa teori mengenai ketimpangan distribusi menurut para ahli, sebagai berikut:

1. Indeks Gini (Gini Rasio)

Untuk mengukur ketimpangan pendapatan di Indonesia dapat dilihat berdasarkan indeks ketimpangan pendapatan yang salah satunya adalah Gini rasio. Dalam mengukur ketimpangan pendapatan menurut Badan Pusat Statistik yang terjadi antar masyarakat dapat dilihat menggunakan indeks gini (gini rasio). Adapun rumus Koefisien Gini menurut (Hanum, 2018) adalah sebagai berikut:

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n P_i(F_i + F_{i-1})$$

Keterangan:

GR : Koefisien Gini (Gini Rasio)

Pi : frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i

Fi : frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i

F_{i-1} : frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-(i-)

Namun, pengukuran dengan menggunakan Koefisien Gini tidak sepenuhnya memuaskan. Tabel berikut ini memperlihatkan patokan yang mengategorikan ketimpangan distribusi berdasarkan nilai koefisien Gini.

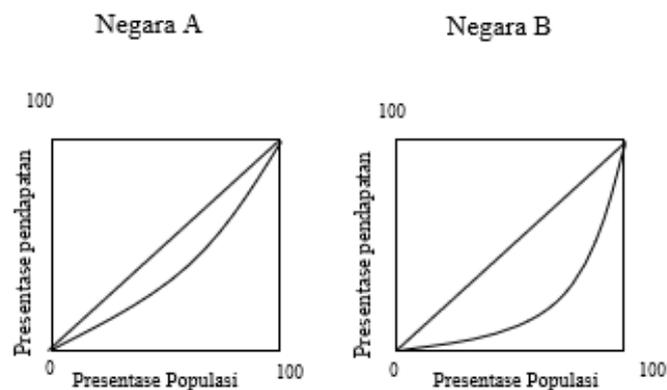
Tabel 2.1 Patokan Nilai Koefisien Gini

Nilai Koefisien Gini	Distribusi Pendapatan
.... < 0,4	Tingkat ketimpangan rendah
0,4 < 0,5	Tingkat ketimpangan sedang
.... > 0,5	Tingkat ketimpangan tinggi

Sumber: (Hanum, 2018)

2. Kurva Lorenz

Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan penduduk. Kurva ini terletak di dalam sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknya merepresentasikan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi datarnya merepresentasikan persentase kumulatif penduduk. Kurvanya ditempatkan pada diagonal bujur sangkar tersebut.



Sumber: (Guru, n.d.)

Gambar 2.2 Kurva Lorenz

Pada negara A kurva Lorenz lebih mendekati garis diagonal, ini menunjukkan bahwa kemiskinan di negara A lebih kecil dan distribusi pendapatannya lebih merata. Pada negara B kurva Lorenz jauh dari garis diagonal, ini menunjukkan ketimpangan yang lebih besar dalam distribusi pendapatan, dengan kemungkinan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi (Shita Tiara, 2016).

3. Bank Dunia

Selain dari sisi pendapatan, pengukuran ketimpangan berdasarkan kriteria Bank Dunia dapat dilakukan menggunakan data pengeluaran. Karena data pengeluaran lebih mudah diperoleh, maka pengukuran ketimpangan menurut kriteria Bank Dunia lebih sering menggunakan data pengeluaran. Kategori ketimpangan yang ditentukan dengan menggunakan kriteria Bank Dunia sebagai berikut:

- a. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12% dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi.
- b. Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12% - 17% dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang atau menengah.
- c. Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17% dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah.

2.1.4.3 Faktor Penyebab Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Ada beberapa faktor yang menentukan ketimpangan antar wilayah dalam (Syafrijal, 2008) dalam (Maidar et al., 2017), antara lain:

1. Perbedaan Kandungan Sumber Daya Alam

Perbedaan kandungan sumber daya alam ini jelas akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumber daya alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih rendah.

2. Perbedaan Kondisi Demografis

Faktor lainnya bila terdapat perbedaan kondisi demografis yang cukup besar antar daerah. Kondisi demografis yang dimaksud adalah perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan

dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan. Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung mempunyai produktivitas kerja yang lebih tinggi sehingga mendorong peningkatan investasi dan akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja sehingga pendapatan merata. Sebaliknya, bila suatu daerah tertentu kondisi demografisnya kurang baik maka hal ini akan menyebabkan relatif rendahnya produktivitas kerja yang menimbulkan pertumbuhan ekonomi daerah lainnya menjadi lebih rendah.

3. Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa

Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa dapat mendorong terjadinya peningkatan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antar daerah. Apabila mobilitas yang lancar maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Demikian pula halnya migrasi yang kurang lancar menyebabkan kelebihan tenaga kerja suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang sangat membutuhkannya. Akibatnya, ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi karena kelebihan suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang membutuhkannya.

4. Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah

Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daerah dimana terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Konsentrasi

kegiatan ekonomi dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, meratanya fasilitas transportasi, baik darat, laut dan udara. Kedua, kondisi demografis (kependudukan) juga ikut mempengaruhi karena kegiatan ekonomi akan cenderung terkonsentrasi dimana sumber daya manusia tersedia dengan kualitas yang lebih baik.

5. Alokasi Dana Pembangunan Antar Wilayah

Alokasi investasi pemerintah ke daerah lebih banyak ditentukan oleh sistem pemerintahan daerah yang dianut. Bila sistem pemerintahan daerah yang dianut bersifat sentralistik, maka alokasi dana pemerintah akan cenderung lebih banyak dialokasikan pada pemerintah pusat, sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi. Akan tetapi jika sebaliknya dimana sistem pemerintahan yang dianut adalah otonomi atau federal, maka dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah sehingga ketimpangan pendapatan akan cenderung rendah.

Ada 8 hal yang menyebabkan ketimpangan distribusi di Negara Sedang Berkembang menurut (Damanik et al., 2018) :

1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat mengakibatkan penurunan pendapatan per kapita.
2. Inflasi, dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan penambahan produksi barang-barang.
3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah.

4. Proyek-proyek padat modal yang memiliki investasi sangat banyak mengakibatkan persentase pendapatan modal kerja lebih besar dari persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga menyebabkan pengangguran bertambah.
5. Mobilitas sosial yang rendah.
6. Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang menyebabkan kenaikan harga barang hasil industri untuk melindungi usaha kapitalis.
7. Akibat ketidakpastian permintaan negara-negara maju terhadap barang-barang ekspor negara sedang berkembang mengakibatkan memburuknya nilai tukar bagi negara-negara sedang berkembang.
8. Hancurnya industri kerajinan rakyat seperti pertukangan industri rumah tangga.

2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia

2.1.5.1 Pengertian Indeks Pembangunan Manusia

Sumber daya manusia menurut (Damahuri, 2014) merupakan modal yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Dengan SDM yang baik dan memadai maka pelaksanaan pembangunan akan semakin lancar dalam berbagai sektor. Guna mencetak sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan pembangunan, indeks pembangunan manusia merupakan hal yang mutlak.

Dalam (Susanti, 2013) indikator pembangunan manusia merupakan salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai kualitas pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam (Herdiansyah & Kurniati, 2020) digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia yang berbasis pada komponen dasar sebagai ukuran kualitas hidup, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang terdapat di masyarakat. Indeks pembangunan manusia diperlukan agar dapat mengklasifikasi suatu negara tergolong dalam negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang serta dapat mengukur dan menentukan kebijakan ekonomi terhadap peningkatan kesejahteraan.

2.1.5.2 Teori Indeks Pembangunan Manusia

Terdapat beberapa teori dalam pertumbuhan indeks pembangunan manusia regional, yaitu Teori Pertumbuhan Klasik. Menurut Adam Smith, sumber daya alam merupakan hal paling utama dari kegiatan produksi masyarakat. Jumlah sumber daya alam yang ada merupakan “batas maksimum” bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Ketika sumber daya yang tersedia belum digunakan sepenuhnya maka yang memiliki peranan untuk memberdayakan sumber daya tersebut adalah jumlah penduduk dan stok modal di suatu daerah. Apabila pertumbuhan penduduk tinggi maka akan menurunkan tingkat kegiatan ekonomi karena produktivitas setiap penduduk akan berkurang dan pada saat keadaan tersebut terjadi, maka kesejahteraan masyarakat menurun.

Menurut David Richardo dan Malthus mempercayai proses pembangunan dalam jangka panjang (*long run*). Menurut mereka dalam jangka panjang perekonomian

akan mencapai *stationary state* yaitu keadaan dimana perkembangan ekonomi tidak terjadi sama sekali, sedangkan perkembangan penduduk akan menurunkan kembali tingkat pembangunan ke tahap yang rendah. Dimana dalam teori David Richardo dan Malthus berlaku “*the law of diminishing return*” maksudnya adalah dikarenakan keterbatasan tanah, maka apabila terjadi pertumbuhan penduduk (bertambahnya tenaga kerja) akan berakibat menurunnya “*marginal product*”. Keadaan ini akan berakibat pekerja akan menerima tingkat upah yang hanya cukup untuk kebutuhan hidup.

2.1.5.3 Aspek Indeks Pembangunan Manusia

Adapun aspek-aspek IPM sebagai berikut:

1. Kesehatan

Dimensi kesehatan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diukur melalui Angka Harapan Hidup (AHH) saat kelahiran. AHH mencerminkan rata-rata usia yang diharapkan dapat dicapai oleh individu pada saat lahir, dan merupakan indikator penting dari kualitas kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dimensi ini menunjukkan kemampuan suatu negara dalam menyediakan layanan kesehatan yang memadai dan meningkatkan kualitas hidup warganya. Adapun rumus dimensi kesehatan :

$$I_{Kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{Min}}{AHH_{Maks} - AHH_{Min}}$$

Keterangan:

I : Indeks Angka Harapan Hidup

AHH : Angka Harapan Hidup (Survei Sosial Ekonomi Nasional)

AHH_{Min} : Nilai Minimum Angka Harapan Hidup (terendah)

AHH_{Maks} : Nilai Maksimum Angka Harapan Hidup (tertinggi)

2. Pendidikan

Pendidikan memiliki peranan penting terhadap suatu bangsa dan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia, sehingga dapat lebih produktif dalam pembangunan dan bisa menjadi penerus bangsa. Dengan demikian program pendidikan mempunyai andil yang besar untuk kemajuan bangsa, baik di bidang ekonomi maupun sosial. Dua indikator utama dalam mengukur derajat pendidikan adalah Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah. Namun, penggunaan indikator angka melek huruf pada perhitungan indeks pendidikan dinilai sudah tidak relevan sehingga pada metode baru perhitungan indeks pendidikan digunakanlah indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah, yang diklaim bisa menggambarkan kondisi yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang bisa terjadi. Rumus Dimensi Pendidikan:

$$I_{HLS} = \frac{HLS + HLS_{Min}}{HLS_{Maks} - HLS_{Min}}$$

Keterangan:

I : Indeks Harapan Lama Sekolah

HLS : Harapan Lama Sekolah (Survei Sosial Ekonomi Nasional)

HLS_{Min} : Nilai Minimum Harapan Lama Sekolah (terendah)

HLS_{Maks} : Nilai Maksimum Harapan Lama Sekolah (tertinggi)

$$I_{RLS} = \frac{RLS + RLS_{Min}}{RLS_{Maks} - RLS_{Min}}$$

Keterangan:

I : Indeks Rata-rata Lama Sekolah

RLS : Rata-rata Lama Sekolah (Survei Sosial Ekonomi Nasional)

RLS_{Min} : Nilai Minimum Rata-rata Lama Sekolah (terendah)

RLS_{Maks} : Nilai Maksimum Rata-rata Lama Sekolah (tertinggi)

$$I_{Pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

Keterangan:

$I_{Pendidikan}$: Indeks Pendidikan

I_{HLS} : Indeks Harapan Lama Sekolah

I_{RLS} : Indeks Rata-rata Lama Sekolah

3. Daya Beli

Kemampuan daya beli penduduk merupakan indikator untuk melihat kondisi ekonomi masyarakat dalam menghitung indeks pembangunan manusia. Menurut Ramirez dalam (Syamsuddin, 2014) mempunyai dua pendapat sederhana untuk melihat kualitas pembangunan manusia yaitu:

- a. Bahwa kinerja ekonomi mempengaruhi pembangunan manusia, khususnya melalui aktivitas rumah tangga.
- b. Pembangunan manusia yang tinggi akan mempengaruhi perekonomian melalui produktivitas dan kreativitas masyarakat.

Dimensi Daya Beli (Pengeluaran):

$$I_{Pengeluaran} = \frac{Pengeluaran - Pengeluaran_{Min}}{Pengeluaran_{Maks} - Pengeluaran_{Min}}$$

Penelitian ini akan menggunakan metode baru untuk perhitungan IPM yang dilakukan oleh BPS. Metode baru yang digunakan BPS dalam menentukan IPM dinilai lebih baik dari metode sebelumnya. Hal tersebut berkaitan dengan penggunaan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif). Indeks pembangunan manusia dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran. BPS menghitung Indeks Pembangunan Manusia dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan} \times I_{Pendidikan} \times I_{Pengeluaran}}$$

Apabila di suatu wilayah memiliki nilai IPM yang tinggi maka mengindikasikan bahwa kondisi masyarakat dalam proses memperoleh pendapatan, mengakses hasil pembangunan, kesehatan, pendidikan. UNDP (*United Nation Development Programme*) memberikan ukuran terhadap keberhasilan pembangunan manusia yakni dengan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) (Yektiningsih, 2018). Berdasarkan kajian tentang capaian indeks pembangunan manusia menurut UNDP, IPM dikelompokkan kedalam beberapa kategori diantaranya :

- 4 $IPM < 60 =$ IPM rendah
- 5 $60 < IPM < 70 =$ IPM sedang
- 6 $70 < IPM < 80 =$ IPM tinggi
- 7 $IPM < 80 =$ IPM sangat tinggi

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Pada tabel 2.2 penulis mnguraikan referensi rujukan jurnal ataupun artikel ilmiah terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Melalui penelitian terdahulu dapat diketahui antara variabel bebas dan variabel terikat yang telah diuji pada penelitian sebelumnya dan dapat mendukung penelitian yang dilaksanakan. Berikut adalah penelitian terdahulu yang dapat dilihat dalam tabel 2.2.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Siti Nur Aini, Ris Yuwono (2023) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Pengangguran, dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur	Dependen: Kemiskinan Independen: Pengangguran dan Ketimpangan Pendapatan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Indeks Pembangunan Manusia	Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan tidak berpengaruh,	Buletin Ekonomika Pembangunan, Vol. 4, No. 1, hal 20-36
2.	Ikke Indrawati, Sudati Nur Sarfiah, Rian Destiningsih (2020) Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Distribusi Pendapatan, dan IPM terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Papua Tahun 2014-2019	Dependen: Kemiskinan Independen: Ketimpangan Pendapatan dan Indeks Pembangunan Manusia	Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Ketimpangan Distribusi Pendapatan positif dan tidak signifikan, dan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan	<i>Directory Journal of Economic</i> , Vol. 2, No. 4
3.	Laga Priseptian, Wiwin Priana Primandhana (2022) Analisis Faktor-Faktor yang	Dependen: Kemiskinan Independen: Indeks Pembangunan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Ketimpangan	IPM berpengaruh positif dan tidak signifikan, dan Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan	Forum Ekonomi, Vol. 24 (1), hal 45-53

No	Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Mempengaruhi Kemiskinan, Jawa Timur.	Manusia dan Pengangguran	Distribusi Pendapatan	terhadap kemiskinan.	
4.	Rekha A., Yulmardi, Hardiani (2021) Analisis Determinasi Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	Dependen: Kemiskinan Independen: Tingkat pengangguran, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Indeks Pembangunan Manusia	Pengangguran dan tingkat partisipasi angkatan kerja tidak berpengaruh signifikan	Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Vol. 10. No.1,
5.	Taufik Hidayat (2023) Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Tenaga Kerja terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara	Dependen: Kemiskinan Independen: Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan	IPM dan Partisipasi Angkatan Kerja negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan	Jurnal Manajemen Akuntansi, Vol. 3, No. 3, hal 903-910
6.	Murbanto, Sri Winda, Rika Surianto, Rapat Piter Sony, Daniel Collyn (2023) Pengaruh Pendidikan, Pendapatan, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan Kepulauan Nias	Dependen: Kemiskinan Independen: Pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Ketimpangan Distributions Pendapatan dan Indeks Pembangunan Manusia	Pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan	Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis, Vol. 1 No. 2, hal. 245-254
7.	Muhammad Ilham Wali, Arvina Ratih Yulihar Taher,	Dependen: Kemiskinan Independen:	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan	Ketimpangan Pendapatan memiliki pengaruh positif dan	<i>Journal Business Economics and</i>

No	Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Heru Wahyudi, Asih Murwiati (2022) Analisis Pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan	Ketimpangan Pendapatan dan Tingkat Pengangguran Terbuka	Indeks Pembangunan Manusia	signifikan, Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki pengaruh secara positif dan signifikan.	<i>Entrepreneurship</i> , Vol. 4, No. 1
8.	Estelita M. Tunga, Daisy S.M. Engka, Steva Y.L. Tumangkeng (2022) Analisis Perbandingan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo	Dependen: Kemiskinan Independen: Ketimpangan Distribusi Pendapatan	Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan Indeks Pembangunan Manusia	Ketimpangan Distribusi pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 22, No 1
9.	Nurjannah, Lapeti Sari, Indri Yovita (2022) Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, IPM dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan di Provinsi Riau	Dependen: Kemiskinan Independen: Indeks Pembangunan, Manusia, dan Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan	Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan tidak signifikan, Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kemiskinan	Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 11 No. 1 Juli

No	Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Tahun 2002-2021				
10.	Siti Sholihah, Lorentino Togar Laut, Gentur Jalunggono (2019) Analisis Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB), Investasi Tenaga Kerja terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2001-2010	Dependen: Kemiskinan Independen: Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka, Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Indeks Pembangunan Manusia	Tenaga Kerja negatif tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan	<i>Directory Journal of Economic</i> , Vol. 1, No. 2
11.	Margaretha Larasati Prayoga, Muchtolifah, Sishadiyanti (2021) Faktor Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo	Dependen: Kemiskinan Independen: Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan	Pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan sedangkan IPM memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap kemiskinan	<i>Economic Education Journal</i> , Vol. 3 No. 2
12.	Ari Kristin Prasetyoningrum, U. Sulia (2018) Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia	Dependen: Kemiskinan Independen: Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan	IPM berpengaruh signifikan negatif, Pengangguran berpengaruh signifikan positif	Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 6, Nomor 2

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran bertujuan untuk menyederhanakan fenomena yang diangkat serta keterkaitan antar variabel yang diteliti dalam tinjauan pustaka, untuk memudahkan penulis maka dimunculkan kerangka pemikiran dalam menjelaskan pengaruh tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, ketimpangan distribusi pendapatan, dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan.

2.2.1 Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Kemiskinan

Pengaruh buruk dari pengangguran yaitu dapat membuat pemasukan masyarakat menjadi kurang dan dapat mengurangi level kesejahteraan yang telah diperoleh pada akhirnya. Menurunnya kemakmuran masyarakat karena pengangguran dapat dipastikan bisa menaikkan peluang terjebak pada masalah kemiskinan karena tidak adanya pemasukan. Kemakmuran atau kesejahteraan merupakan keadaan yang ingin dirasakan dan dicapai oleh setiap orang, namun ketika seseorang kehilangan pekerjaan dan merasa kurang kaya karena tidak memiliki penghasilan, maka orang tersebut dapat dikatakan terjebak dalam kemiskinan.

Tingkat pengangguran terbuka mempunyai hubungan positif dan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. (Putri et al., 2021) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa tingkat pengangguran mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, ini menunjukkan semakin tinggi tingkat pengangguran maka akan semakin tinggi kemiskinan. Masyarakat yang menganggur tidak mampu memenuhi kebutuhan kebutuhan hidupnya, begitupun masyarakat yang

tidak ada pekerjaan atau yang sedang mencari pekerjaan tidak memiliki pendapatan yang memenuhi sehingga akan berdampak pada tingkat kemiskinan.

Penelitian lain yang dilakukan (Robby Ishak, Junaidin Zakaria, 2020) memiliki hasil bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Pengangguran akan menimbulkan efek mengurangi pendapatan masyarakat dan itu akan mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai. Semakin turunnya tingkat kemakmuran akan menimbulkan kemiskinan.

2.2.2 Hubungan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dengan Kemiskinan

Tingkat partisipasi angkatan kerja dan kemiskinan mempunyai hubungan yang erat dengan kemiskinan karena tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan ukuran partisipasi penduduk dalam angkatan kerja yang menggambarkan seberapa besar penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang aktif dan tidak aktif bekerja. Dengan meningkatnya penduduk usia muda yang produktif berimbas pada peningkatan ketersediaan jumlah angkatan kerja. Kenaikan jumlah angkatan kerja mendorong pertumbuhan ekonomi dengan penduduk produktif semakin banyak sehingga pasar domestik meningkat, maka permintaan pun meningkat sehingga menurunkan angka kemiskinan.

Penelitian oleh (Taufik Ashari & Athoillah, 2023) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. TPAK termasuk sebuah faktor yang mempengaruhi output dalam aktivitas perekonomian, bertambah banyaknya penduduk yang produktif semakin tinggi pula jumlah output. Meningkatnya TPAK pada suatu daerah dapat

meningkatkan pendapatan perkapita serta taraf konsumsi yang kemudian akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

2.2.3 Hubungan Ketimpangan Distribusi Pendapatan dengan Kemiskinan

Distribusi pendapatan merupakan cerminan atas merata atau timpangnya tingkat pendapatan dan hal ini merupakan penentu utama kemiskinan. Kemiskinan itu sendiri sangat ditentukan atas rata-rata pengeluaran perkapita penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. Distribusi yang tidak merata akan menghasilkan efek negatif pada masyarakat, seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dan peningkatan angka kemiskinan. (Cendanawangi et al., 2020) menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Dengan adanya peningkatan pada ketimpangan pendapatan, maka akan meningkatkan pula angka kemiskinan.

Penelitian lain oleh (Indrawati dan Sudati Nur Sarfiah 2020) juga menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan tidak signifikan ketimpangan distribusi pendapatan terhadap tingkat kemiskinan. Terfokusnya pembangunan hanya di sektor-sektor tertentu sehingga membuat distribusi pendapatan semakin timpang dalam suatu wilayah.

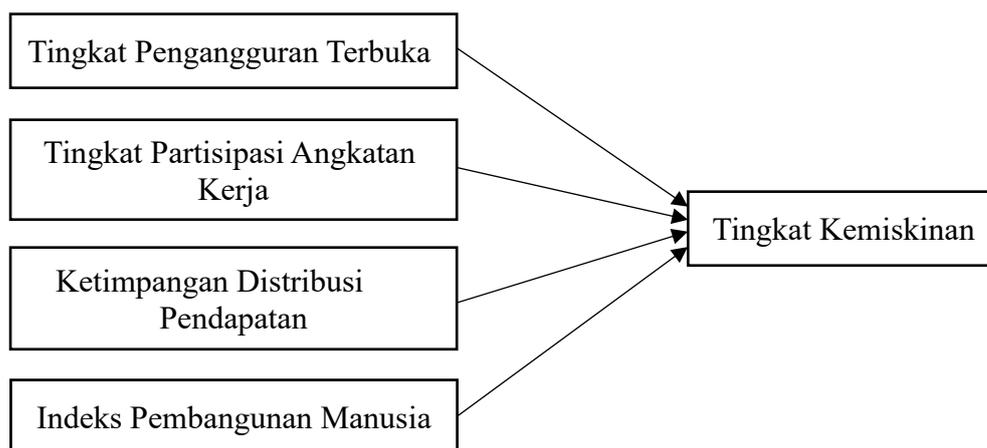
2.2.4 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia dengan Kemiskinan

Salah satu tolak ukur untuk melihat kualitas hidup seseorang adalah dengan Indeks Pembangunan Manusia diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi (daya beli). Keberhasilan dalam pembangunan manusia tidak lepas dari kinerja pemerintah melalui berbagai regulasi agar tercapainya

ketertiban sosial. Kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Dengan rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah selanjutnya pendapatan akan menyebabkan tingginya angka kemiskinan.

Dalam (Ashari dan Athoillah 2023) menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan memiliki pengaruh negatif dan signifikan dengan menurunnya IPM akan menambah jumlah kemiskinan. Pembangunan manusia melalui pendidikan, kesehatan dan harapan hidup mengurangi ketimpangan dan kemiskinan secara langsung, yaitu: dengan meningkatkan produktivitas bagi golongan miskin, memperbaiki kesempatan mereka untuk memperoleh pekerjaan dengan upah yang lebih baik.

Secara sistematis, kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan permasalahan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Adapun hipotesis ini dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial tingkat pengangguran terbuka dan ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh positif, sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja dan indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2018-2023.
2. Diduga secara bersama-sama tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, ketimpangan distribusi pendapatan, dan indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2018-2023.